

**KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA  
PEKANBARU DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN  
ANGKUTAN KOTA (UJI KIR)**

**AINUN NAZIFAH DAN ERNAWATI**

Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293  
*e-mail*: riffa.muluk91@gmail.com  
CP: 081277951195

**Abstract: Performance Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika City Pekanbaru In Conducting the Examination City Transport ( Test KIR).** In order to do inspection city transport in the case of test KIR. City transport is one of the transport that is widely used by the community in the city pekanbaru. For that city must transit meet the three criteria in order for convenience, security, and the feasibility of the road for passengers and other road users. There are several obstacles or constraints in conducting the examination city transport in the city pekanbaru still, among others, the number the city does not take care of the transport test KIR in accordance with a predetermined time. In addition the city transport in pekanbaru his condition is very poor, some of the vehicles were off due to old. Concept of the theory that researchers use performance. The performance consists of the responsiveness, responsibility and accountability. This research used qualitative research method with study of descriptive data. The results of this study indicate that Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika city pekanbaru in particular UPTD motor vehicle testing in conducting an examination test KIR it is not maximal, this is due to the presence of the city transport already passed test KIR but still worrying situation, so may cause disquiet in the community.

Keywords : Performance, Examination, Test KIR

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan Ekonomi suatu negara atau Daerah tidak terlepas dari pengaruh perkembangan sarana dan prasarana yang mendukung misalnya transportasi. Dalam laju pembangunan pada setiap daerah yang ada di Indonesia transportasi memegang peranan penting. Karena transportasi adalah alat pengangkutan atau alat pemindahan sesuatu dari tempat yang satu ketempat yang lain transportasi sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam perkembangan transformasi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Baik itu dari segi bentuk maupun fungsinya yang semakin canggih dan multifungsi. Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut. Transportasi merupakan salah satu unsur yang penting dalam mendukung kegiatan dan perputaran roda pembangunan nasional khususnya kegiatan dalam bidang perekonomian seperti kegiatan perdagangan dan kegiatan industri. Kawasan kota merupakan tempat kegiatan penduduk dengan segala aktivitasnya. Sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung aktivitas kota.

Untuk itu pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga untuk mengatur transportasi dilingkup nasional dengan nama lembaga tersebut adalah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Begitu juga dengan Kota Pekanbaru yang merupakan kota yang sedang berkembang untuk itu diperlukan suatu lembaga yang mengatur jalannya transportasi tersebut, sehingga transportasi dapat terkelola dengan baik. Di Pekanbaru sendiri transportasi umum seperti Transmetro, Buskota, Taxi, Angkutan Kota yang banyak kita jumpai. Angkutan kota merupakan salah satu transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat di Kota Pekanbaru, untuk itu angkutan kota harus memenuhi tiga kriteria agar kenyamanan, keamanan, dan kelayakan jalan bagi penumpang dan pengguna jalan lainnya. Ketiga kriteria tersebut yaitu perbaikan sarana, prasarana, dan manajemen sumber daya manusia. Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas secara umum melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang mana sebagian tugas pokok adalah membantu walikota dalam memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

Sesuai dengan PERDA Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2009 menyebutkan bahwa angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. Sedangkan standar dari uji kelaikan jalan atau laik jalan adalah persyaratan minimum, kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Sedangkan uji berkala dijelaskan dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2009, pasal 53, yaitu :(a) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. (b) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan (2) Pengesahan hasil uji. Sedangkan standar pelayanan minimum atau (SPM) dalam melakukan pengujian KIR, yaitu (1) Masyarakat pemilik kendaraan wajib uji melakukan pendaftaran dengan membawa syarat-syarat seperti, kendaraan wajib uji, buku uji, stnk, dan izin trayek (khusus angkutan umum). Akan menerima kwitansi pembayaran. (2) Membawa kendaraan yang akan diuji dan menyerahkan bukti pembayaran, lalu akan menerima formulir pemeriksaan kondisi teknis dan nomor urut pemeriksaan. (3) Pemilik melakukan pemeriksaan kendaraan di ruang pengujian, yang meliputi pengujian, lampu, rem, kebisingan, emisi gas buang, dan kelengkapan lainnya. (4) Pemasangan plat uji dan dinyatakan lulus uji. (5) Apabila kendaraan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengujian, maka pemilik diharuskan melakukan perbaikan kendaraannya sesuai dengan rekomendasi kerusakan pada formulir pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu untuk diperiksa kembali (Pengujian Ulang). Kemudian standar operasional prosedur atau (SOP) DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru dalam melakukan uji KIR yaitu: (1) Menyediakan unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. (2) Melakukan pengujian tiap enam bulan sekali.

Dari peraturan yang disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika memiliki tugas untuk melakukan uji pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan atau uji KIR, maka untuk itu DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan operasi penertiban angkutan kota yang mana dari hasil operasi penertiban atau razia angkutan umum masih banyak dijumpai angkutan kota yang tidak memperpanjang izin trayek maupun KIR (uji kelayakan jalan), serta masih banyak angkutan kota yang tidak memasang papan trayek, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Dari 1869 unit armada angkutan kota hanya 1123 unit yang memiliki izin sementara sisanya sebanyak 757 unit tidak memiliki surat izin. Seharusnya setiap kendaraan angkutan kota wajib memiliki surat izin trayek maupun layak jalan yang dikeluarkan oleh DISHUBKOMINFO, sehingga kendaraan angkutan kota tersebut dinyatakan layak jalan dan bebas uji KIR sehingga tidak membahayakan penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Menyikapi hal ini seharusnya DISHUBKOMINFO lebih mengoptimalkan kinerja pemeriksaan angkutan kota (uji KIR). Dari uraian diatas, maka timbul beberapa fenomena yaitu: (a) Berdasarkan data DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru, dari sebanyak 1.869 unit angkutan kota di Kota Pekanbaru, hanya 1.123 unit angkutan kota yang memiliki izin trayek atau legal. Jika sebelumnya perhari bisa mencapai 200 angkutan kota yang mengurus izin KIR kini berkurang drastis hanya 100 angkutan kota. (b) hampir 98 persen angkutan kota yang masih beroperasi di Kota Pekanbaru kondisinya sangat memprihatinkan. Beberapa bagian kendaraan sudah lepas akibat tua. Tidak hanya itu, upaya pengemudi angkutan kota untuk menutupi keroposnya bagian kendaraan justru membuat angkutan kota semakin parah. (c) Selain kondisi fisik, kelengkapan kenyamanan dan keselamatan kendaraan juga banyak yang hilang. Terbukti, beberapa kali Dishub maupun Lantas melaksanakan razia ditemui angkutan yang tidak memiliki spion, lampu sign yang sudah rusak dan tidak jarang juga melihat angkutan tersebut rusak atau mogok di tengah jalan saat masih membawa penumpang. Parahnya dengan kondisi tersebut, pengemudi angkutan kota yang kejar setoran kerap menghentikan kendaraan sesuka hatinya agar "sewa" yang ada di pinggir jalan didapatkannya. Tanpa memperdulikan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lain di belakangnya. (d) Dan masih adanya ditemukan angkutan kota yang masih memakai stiker yang menutupi kaca belakang sehingga dapat mengganggu pandangan supir dari dalam angkutan kota tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang kinerja pemeriksaan angkutan kota (uji kir) di kota pekanbaru.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling*. Metode *Snowball Sampling* adalah metode penentuan sampel yang pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum dirasa lengkap dalam memberikan data, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan *key informant* informan-informan susulan penelitian mengenai kinerja dinas perhubungan komunikasi dan informatika kota pekanbaru dalam melakukan pemeriksaan angkutan kota (uji kir) serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pemeriksaan angkutan kota. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari Kantor DISHUBKOMINFO, UPTD pengujian kendaraan bermotor dan instansi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pemeriksaan Angkutan Kota (Uji KIR)**

Transportasi merupakan salah satu unsur yang penting dalam mendukung kegiatan dan perputaran roda pembangunan nasional khususnya kegiatan dalam bidang perekonomian seperti kegiatan perdagangan dan kegiatan industri. Kawasan kota merupakan tempat kegiatan penduduk dengan segala aktivitasnya. Sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung aktivitas kota. Di Pekanbaru sendiri transportasi umum seperti Transmetro, Buskota, Taxi, Angkutan Kota yang banyak kita jumpai. Angkutan kota merupakan salah satu transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat di Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa standar dari uji kelaikan jalan atau laik jalan adalah persyaratan minimum, kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Untuk melihat bagaimana kinerja dinas perhubungan komunikasi dan informatika kota pekanbaru dalam melakukan pemeriksaan angkutan kota (uji KIR) maka digunakan beberapa elemen dari sistem kinerja, dimana elemen-elemen tersebut sesuai teori yang digunakan penulis yaitu menurut **Lenvine et.al** dalam **Chazi Nasucha(2004 : 25)**:

#### ***Responsivitas***

Dalam penelitian ini responsivitas atau daya tanggap berarti kemampuan dari DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru dalam merespon dan menanggapi apa yang menjadi permasalahan dan keinginan dari masyarakat pemilik kendaraan, dalam hal ini responsivitas ditunjukkan dengan seberapa besar daya tanggap pegawai DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru dalam menyikapi keluhan dari masyarakat yang mengalami kesulitan atau kendala dalam melakukan proses pengujian KIR. DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru sebagai instansi pemerintahan dalam memberikan pelayanan tidak luput dari komplain/keluhan pemilik

kendaraan bermotor yang mengujikan kendaraannya. Hal ini terjadi karena karakteristik dan keinginan dari masyarakat yang berbeda-beda. Masyarakat akan merasa senang terhadap sikap petugas atau pegawai di DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru yang serius menangani setiap keluhan yang disampaikan serta bersama-sama mencari jalan keluar. Pegawai dalam situasi seperti ini harus mempunyai kemauan untuk memecahkan masalah dan kendala secara cermat, tepat, dan bijaksana. Dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

a. Daya tanggap DISHUBKOMINFO dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan uji KIR

Keluhan dari masyarakat pemilik kendaraan yang akan diujikan adalah salah satu ungkapan penilaian akan kualitas kinerja DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru. Bagaimanapun keluhan itu datang dan tujuannya tiap pegawai harus mempersiapkan mental dalam menghadapi keluhan. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan uji KIR, fasilitas penunjang sangat berperan penting untuk melihat sejauh mana kinerja DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan fasilitas penunjang ikut berperan dalam kelancaran kegiatan tersebut. Selain dilihat dari kemampuan pegawai dalam mengetahui keinginan dan keluhan masyarakat, responsivitas disini juga ditekankan pada seberapa besar daya tanggap pegawai di DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru dalam hal ini UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam mengetahui berapa jumlah angkutan kota yang wajib melakukan pengujian karena setiap tahun jumlah kendaraan wajib uji jumlahnya selalu berubah-ubah.

### ***Responsibilitas***

Responsibilitas dalam penelitian mengenai kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam Melakukan Pemeriksaan Angkutan kota (uji Kir) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kota Pekanbaru tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

a. Motivasi pegawai dalam melakukan kegiatan uji KIR ?

Selanjutnya kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kota Pekanbaru dapat dilihat dari motivasi pegawai dalam menjalankan tugasnya terutama dalam proses pengujian KIR apakah kinerja mereka sungguh-sungguh dan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

Dapat diketahui bahwa standar pelayanan minimum atau (SPM) dalam melakukan pengujian KIR, yaitu sebagai berikut:

Masyarakat pemilik kendaraan wajib uji melakukan pendaftaran dengan membawa syarat-syarat seperti, kendaraan wajib uji, buku uji, stnk, dan izin trayek (khusus angkutan umum). Akan menerima kwitansi pembayaran

Membawa kendaraan yang akan diuji dan menyerahkan bukti pembayaran, lalu akan menerima formulir pemeriksaan kondisi teknis dan nomor urut pemeriksaan

Pemilik melakukan pemeriksaan kendaraan di ruang pengujian, yang meliputi pengujian, lampu, rem, kebisingan, emisi gas buang, dan kelengkapan lainnya.

Pemasangan plat uji dan dinyatakan lulus uji.

Apabila kendaraan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengujian, maka pemilik diharuskan melakukan perbaikan kendaraannya sesuai dengan rekomendasi kerusakan pada formulir pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu untuk diperiksa kembali (Pengujian Ulang).

Prosedur yang telah dijelaskan di atas adalah wajib dilalui oleh masyarakat yang menguji kendaraan untuk bisa mendapatkan tandabukti lulus uji KIR. Sehingga lama atau tidaknya proses pengujian juga tergantung pada kelancaran proses dan langkah-langkah di atas. Namun pada dasarnya apabila masyarakat telah memahami langkah-langkah dan persyaratan pengujian maka sesungguhnya prosedur pengujian KIR tidaklah sulit. Dalam melakukan pemeriksaan angkutan kota (uji Kir), keadaan pegawai di DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru sangat berperan dalam kelancaran kegiatan tersebut, sehingga dapat dilihat dari apakah pelaksanaan kegiatan pengujian KIR dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan dari DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap bagian-bagian yang ada di kendaraan diperlukan seorang tenaga yang mempunyai kemampuan atau keahlian khusus yang mengetahui seluk beluk tentang pengujian.

Agar pelaksanaan kegiatan pengujian sesuai dengan yang diharapkan dan akurat, diperlukan petugas penguji atau tenaga ahli yang berpengalaman. Sehingga akan didapatkan hasil uji yang akurat sesuai dengan keadaan di lapangan. Selain itu jumlah pegawai fungsional di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor masih memerlukan penambahan personil.

### ***Akuntabilitas***

Akuntabilitas menunjuk pada seberapa jauh penyelenggaraan kinerja suatu organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan baik secara langsung atau tidak langsung kepada publik, maupun kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas kinerja organisasi publik merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar kinerja organisasi publik dengan pelaksana yang menjadi dasar atau pedoman penyelenggaraan suatu kegiatan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

- a. Bentuk pertanggungjawaban DISHUBKOMINFO baik kepada masyarakat maupun kepada instansi yang lebih tinggi

Dalam penelitian tentang kinerja DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru melakukan pemeriksaan angkutan kota, akuntabilitas digunakan sebagai indikator yang menunjukkan kesesuaian antara kegiatan pengujian KIR yang dilakukan DISHUBKOMINFO dalam hal ini UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

Sebagai instansi pemerintahan di Kota Pekanbaru, Dinas DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi pemerintahan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam hal pengujian KIR. Dengan demikian jelas terlihat bahwa DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru merupakan sebuah instansi vertikal dibawah Pemerintahan Kota Pekanbaru. Berkaitan dengan pertanggungjawaban DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru dalam melakukan pemeriksaan angkutan kota (uji KIR) kepada masyarakat, maka semua pihak harus memberikan kinerja kepada masyarakat dengan penuh ketelitian, profesionalisme pegawai, dan

kedisiplinan. Selain itu kejelasan aturan termasuk kejelasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengujian KIR sangat diperlukan agar masing-masing pegawai mampu melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut perlu ditekankan mengingat tugas besar yang diberikan kepada DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru sebagai satu-satunya instansi pemberi layanan dalam bidang pengujian KIR di Kota Pekanbaru, untuk itulah diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban sebagai bukti pelaksanaan tugasnya dalam periode waktu tertentu. Mengenai laporan pertanggungjawaban di DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru dilaksanakan secara berkala.

- b. Melakukan perencanaan kegiatan dalam rangka meminimalisir pelanggaran uji KIR pada angkutan umum khususnya Angkutan kota

Dalam hal ini tindakan apa saja yang dilakukan oleh DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru dalam rangka meminimalkan pelanggaran terhadap pemeriksaan uji KIR. Dapat diketahui bahwa DISHUBKOMINFO kota Pekanbaru melakukan kegiatan untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran dalam uji KIR yaitu dengan diadakannya operasi atau razia terhadap angkutan kota tersebut.

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam Melakukan Pemeriksaan Kelayakan Angkutan Kota (uji KIR)**

### ***Faktor Internal***

- a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia berkaitan dengan kualitas pegawai dalam melakukan tanggung jawabnya. Dalam proses pengujian KIR jumlah pegawai yang ada di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kota Pekanbaru belum mencukupi secara kuantitas. Seperti yang telah disebutkan di awal bahwa dalam proses pengujian kendaraan bermotor diperlukan tenaga pengujian yang benar-benar ahli dalam pengujian dan mempunyai SK pengujian. Namun, sampai saat ini pegawai di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang mempunyai SK pengujian baru berjumlah 7 orang. Dengan jumlah pegawai yang mempunyai SK pengujian masih minim proses pengujian kendaraan bermotor bisa berjalan lama karena satu paket pengujian terdiri dari beberapa jenis alat uji dan pegawainya secara bergantian memeriksa setiap alat.

- b. Sarana dan prasarana kedinasan

Dalam proses pengujian KIR sarana dan prasarana adalah suatu kebutuhan primer, hal ini dikarenakan proses pengujian KIR tidak bisa terlepas dari sarana dan prasarana misalnya kelengkapan alat uji. Dengan sarana dan prasarana yang lengkap maka akan meningkatkan kinerja pegawai.

### ***Faktor Eksternal***

- a. Faktor Ekonomi

Kondisi perekonomian yang selalu berubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengujian KIR. Kenaikan bahan bakar minyak ternyata ikut mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan uji KIR, hal ini dikarenakan daya beli masyarakat berkurang, serta pendapatan para pemilik angkutan kota yang menurun. Belum lagi mereka harus bersaing dengan bus transmetro, hal ini dikarenakan banyak para pengguna angkutan kota (oplet) beralih menggunakan bus transmetro, sehingga secara tidak langsung mengakibatkan pendapatan supir

angkutan kota berkurang. Sehingga membuat beberapa pemilik angkutan kota yang merasa aman apabila tidak mengujikendaraannya memilih tidak mengujikan kendaraannya daripada harus mengeluarkan uang untuk melakukan pengujian KIR.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan pengujian KIR adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian, hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat pemilik kendaraan angkutan kota baru melakukan pengujian ketika terjaring razia penertiban. Hal ini tentunya harus segera dibenahi dengan cara melakukan sosialisasi pentingnya pengujian KIR bagi keselamatan penumpang maupun pengguna jalan raya lainnya.

## SIMPULAN

Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dalam Melakukan Pemeriksaan Angkutan Kota (uji KIR) belum maksimal. Daya tanggap pegawai di DISHUBKOMINFO Kota Pekanbaru khususnya pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor masih rendah. Walaupun hanya sedikit ditemukan keluhan dari para pemilik kendaraan bermotor dan pegawai sudah berupaya untuk memenuhi keluhan masyarakat serta bersikap ramah saat melakukan pengujian, namun belum semua aspirasi atau keinginan dari masyarakat bisa terpenuhi.

Serta Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melakukan pemeriksaan uji KIR belum maksimal, hal ini dikarenakan adanya angkutan kota yang sudah lulus uji KIR namun masih menghawatirkan keadaannya, sehingga dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Sementara pertanggungjawaban secara vertikal atau kepada instansi yang lebih tinggi, yang dilakukan dengan cara berkala dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Bumi Aksara
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Mangkunegara. 2005. *Evaluasi Kinerja dan SDM*. Bandung : Refika Aditama
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Public, Teori dan Praktik*. Jakarta : perbit PT. Gramedia Widiasarana
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Public, Teori dan Praktik*. Jakarta : perbit PT. Gramedia Widiasarana
- Prawirosentono, Suyudi. 1999. *Kebijakan Kinerja Pegawai : Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta : BPFE
- Rucky, Achmad S. 2004. *System Manajemen Kinerja*. Jakarta : Gramedia
- Siagian, Sondang P. 2002. *Manajemen Sumberdaya Manusia, Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara